





DINAS TENAGA KERJA

LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



disnaker.dumai 

Jl. Kesehatan, Tlk. Binjai, Kec. Dumai Timur
Kota Dumai, Riau 28826 



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Kesehatan No. 5, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau 28813,
Laman disnaker.dumaikota.go.id

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN LKIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
NIP. : 19770524 199602 1 002.
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 31 Desember 2023 yang bersumber pada:

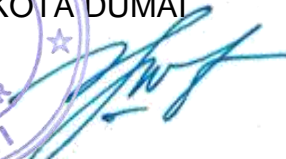
1. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. DPPA Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2024
4. Laporan SPJ Fungsional pada sistem SIPKD

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 15 Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI




SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR LAMPIRAN | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Isu-isu Strategis | 5 |
| 1.5 Cascading Kinerja | 6 |
| 1.6 Peta Proses Bisnis | 7 |
| 1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI | 10 |
| 2.1 Rencana Strategis | 10 |
| 2.2 Tujuan dan sasaran | 11 |
| 2.3 Kebijakan, Strategi dan Program | 13 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI | 18 |
| A Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai | 18 |
| 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 | 20 |
| 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir | 22 |
| 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra | 27 |
| 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional | 29 |
| 3.5 Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ | |

| | |
|---|-----------|
| Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi | 30 |
| 3.6 Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 35 |
| 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | 36 |
| 3.8 Prestasi dan Penghargaan | 40 |
| B Realisasi Anggaran | 40 |
| BAB IV PENUTUP | 42 |

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KINERJA (LKIP) DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------------|---|------|
| Tabel 1 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2024 ... | xii |
| Tabel 2 | Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai | xiii |
| Tabel 3 | Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 | xiii |
| Tabel 4 | Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 | xvi |
| Tabel 5 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Tahun 2024 | xv |
| Tabel 6 | Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 | xvi |
| Tabel I. 1 | Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 | 9 |
| Tabel II. 1 | Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 | 13 |
| Tabel II. 2 | Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 | 14 |
| Tabel II. 3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai | 15 |
| Tabel II. 4 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 | 16 |
| Tabel II. 5 | Program Kerja Dinas Tenaga Kerja | 16 |
| Tabel II. 5 | Perubahan Program kerja Dinas Tenaga Kerja..... | 17 |
| Tabel III. 1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 19 |
| Tabel III. 2 | Atribut Capaian Indikator Kinerja..... | 20 |
| Tabel III. 3 | Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024..... | 20 |
| Tabel III. 4 | Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir | 23 |
| Tabel III. 5 | Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra.... | 27 |
| Tabel III. 6 | Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional | 29 |
| Tabel III. 7 | Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 35 |
| Tabel III. 8 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 36 |
| Tabel III. 9 | Prestasi dan Penghargaan Dinas Kerja Kota Tahun 2024 | 40 |
| Tabel III. 10 | Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|---------------|---|----|
| Gambar I. 1 | Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai | 4 |
| Gambar I. 2 | Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai | 7 |
| Gambar I. 3 | Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai | 8 |
| Gambar II. 1 | Misi 1 Kota Dumai | 11 |
| Gambar III. 1 | Dokumentasi Kegiatan Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tahun 2024 | 37 |
| Gambar III. 2 | Dokumentasi Kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2024 | 38 |
| Gambar III. 3 | Dokumentasi Kegiatan Hubungan Industrial Tahun 2024 | 39 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Tenaga Kerja Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Tenaga Kerja.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai 15 Januari 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, maka sebagai unsur teknis, Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menjalankan fungsi Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2. Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Tenaga Kerja melaksanakan MISI yang ke 1 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri”** dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu **“Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan Terciptanya situasi kerja yang kondusif”**.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Tenaga Kerja
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- III. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan

Kerja Secara Terintegrasi

4. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
5. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
4. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

V. Program Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok

Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Sub Kegiatan Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja tidak merubah target dari indikator kinerja, yang berubah adalah anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai target kinerja. Adapun perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel I
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2024

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja. | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10% |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 10% |
| 2. | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 20% |

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Dinas Tenaga Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp6.960.759.280 (*Enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain:

Tabel 2
Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|
| 1. | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp. 80.000.000 | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. 560.000.000 | APBD |
| 3. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp. 790.000.000 | APBD |
| 4. | Program Hubungan Industrial | Rp. 625.000.000 | APBD |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.905.759.280 | APBD |
| J U M L A H | | Rp. 6.960.759.280 | APBD |

Sumber data : DPA Murni Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran APBD Kota Dumai Tahun 2024, maka pada September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|
| 1. | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp. 80.000.000 | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. 474.702.900 | APBD |
| 3. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp. 450.000.000 | APBD |
| 4. | Program Hubungan Industrial | Rp. 2.906.987.100 | APBD |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.672.979.104 | APBD |
| J U M L A H | | Rp. 9.584.669.104 | APBD |

Sumber data : DPPA Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian 2024 | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | | Tidak Berhasil |
|----|--|---|--------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------|--|----------------|
| 1. | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10 % | 4,59 % | 45,9 % | - | - | - | | V |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 10 % | 20,26 % | 202,6 % | V | - | - | | - |
| 2. | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 20 % | 40,62 % | 203,1 % | V | - | - | | - |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 100 % | V | - | - | | - |

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp9.584.669.104 (*Sembilan milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 8.667.094.104 (*Delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu seratus empat rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp.9 1 7 . 5 7 5 . 0 0 0 (*Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

| | | | |
|--------------------|----------|------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi | : | Rp. | 8.667.094.104 |
| 2. Belanja Modal | : | Rp. | 9 1 7 . 5 7 5 . 0 0 0 |
| J u m l a h | : | Rp. | 9.584.669.104 |

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Tahun 2024

| TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|--|---|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tujuan: Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja | | | | | | | |
| Sasaran: Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10% | 4,59% | 45,9% | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|---------|-----------------|-----------------|------|
| Program: Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan | 10% | | | Rp100.000.000 | Rp96.685.000 | 100% |
| | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 10% | 20,26% | 202,6 % | | | |
| Program: Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase penempatan tenaga kerja | 35% | | | Rp100.000.000 | Rp84.960.000 | 100% |
| Sasaran: Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 20% | 40,62% | 203,1% | | | |
| Program: Program Hubungan Industrial | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan | 85% | | | Rp2.265.025.400 | Rp2.250.863.700 | 100% |

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumbae Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI | | KETERA NGAN |
|----|---|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Meningkat kan kesempat an kerja dan kondisi kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 45,9 | 100 | 0,46 | Kurang Efisien | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-----|------|---------|--|
| 2. | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 202,6 | 100 | 2,03 | Efisien | |
| 3. | | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 203,1 | 100 | 2,03 | Efisien | |

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Besaran Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan* persentase capaian kinerja tahun 2024 (45,9%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
2. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan* persentase capaian kinerja tahun 2024 (202,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
3. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan* persentase capaian kinerja tahun 2024 (203,1%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

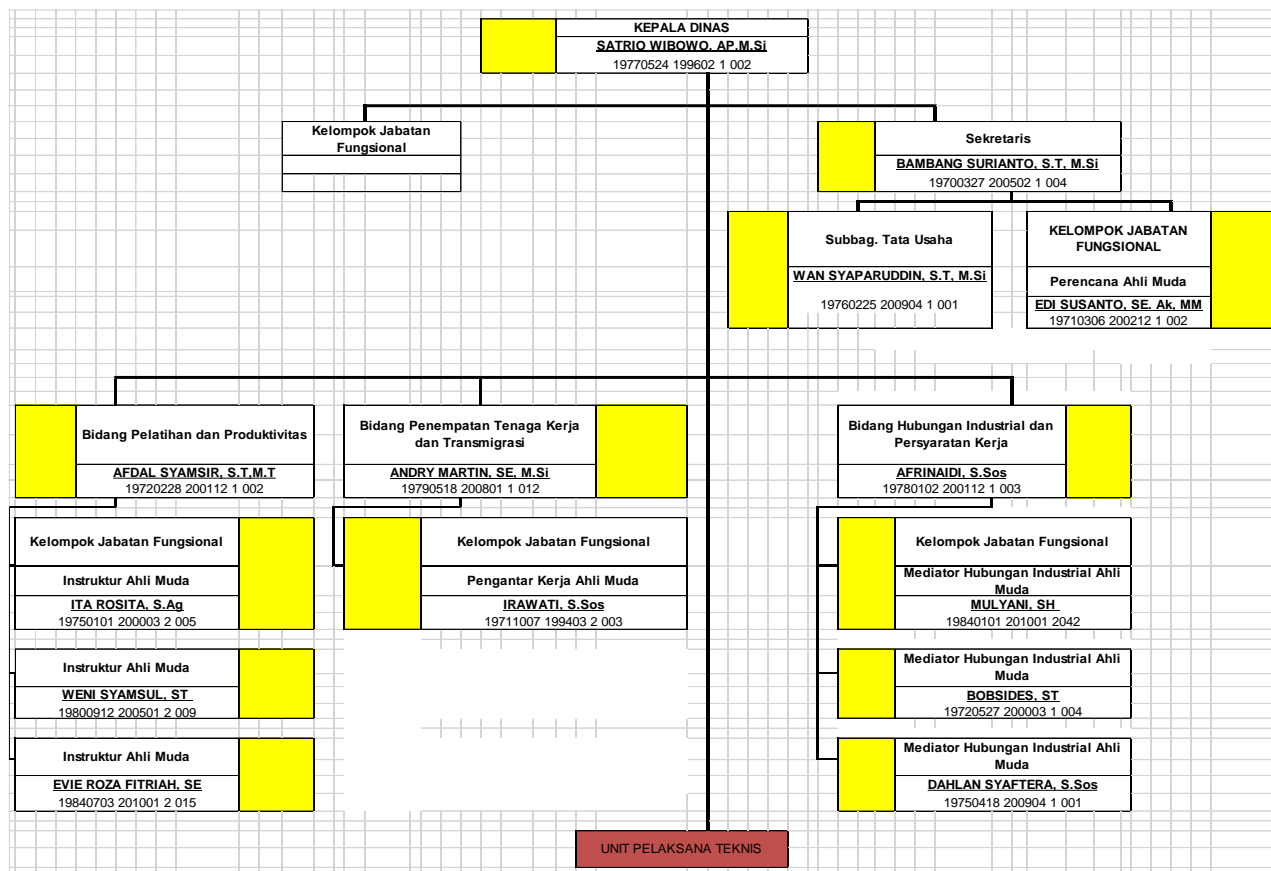
1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2. Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - 2.1 Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. UPT.

Gambar I. 1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan:

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang perlu ditangani sbb:

1. Tingginya Angka Pengangguran

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian, pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja, dimana peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Rumah Terampil - Latihan Kerja yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja

Isu rendahnya kualitas tenaga kerja ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh mereka yang mempunyai pendidikan maksimal tamat SD, kemudian tamatan SLTP dan tamatan SLTA. Pendidikan tinggi merupakan bagian terkecil dari seluruh angkatan kerja. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yaitu dengan menjembatani dunia pendidikan formal dengan dunia kerja.

Pasar kerja mensyaratkan kompetensi dan kualifikasi diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensinya melalui berbagai keterampilan dibalai/lembaga pelatihan kerja dan dengan demikian diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas calon tenaga kerja pada lembaga pelatihan.

3. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Maraknya unjuk rasa pekerja diantaranya disebabkan masih lemahnya lembaga hubungan industrial. Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi Isu Strategis untuk penanganan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan upah yang layak dan berkeadilan diterima semua pihak) dan sarana hubungan industrial. Kurangnya perlindungan terhadap pekerja dapat dijelaskan bahwa masih adanya perilaku yang diskriminasi, adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan perempuan, masih banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 2
Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA | | | | | | | | | |
| Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | | | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | | | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial | | | |
| Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | | | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | | | |
| MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING | | | MENINGKATNYA SERAPAN TENAGA KERJA | | | MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS | | | |
| Persentase Tenaga Kerja Terampil dan Kompeten | | | Persentase Serapan Tenaga Kerja | | | Persentase Penuntai Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | | | |
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Terlatih | Meningkatnya Kapasitas Kolaborasi Palihan | Meningkatnya Kemitraan dengan Dunia Usaha | Meningkatnya Akses Informasi Pasar Kerja yang dapat Diakses Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja Formal dan Informal | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyiaran Kerja | Meningkatnya Sistem Pengupahan yang Adil | Meningkatnya Pengelesaian Hubungan Industrial | Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja Formal dan Informal |
| Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 1. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Milik Pemerintah yang di Akreditasi 2. Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Berakreditasi | Jumlah Kerja sama Durasi Usaha Durasi Industri | Jumlah Pencari Kerja yang dapat mengakses Informasi Pasar Kerja | 1. Jumlah Lembaga Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja yang berbadan Hukum 2. Jumlah AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah), AKL (Angkatan Kerja Lokal), dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara) | 1. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Formal yang di tempatkan 2. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Informal yang di tempatkan | 1. Jumlah Perusahaan yang sudah melaksanakan Tata Kelola yang Baik 2. Jumlah Perusahaan yang telah mempunyai Ketenagakerjaan | 1. Jumlah Perusahaan yang menyusun Struktur Skala Upah 2. Penetapan Upah Minimum Kota | Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan | Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan |

Sumber data : Penjenjangan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar I. 3

Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

| PROSES BISNIS/TUJUAN | | PROSES BISNIS / SASARAN | | SUB PROSES BISNIS / STRATEGI | | Peta Lintas Fungsi / ARAH KEBIJAKAN | |
|----------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Kode | PROSES UTAMA | Kode | PROSES UTAMA | Kode | PROSES UTAMA | Kode | PROSES UTAMA |
| DTK 01 | Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja | DTK 01 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | DTK 01.01 | Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat | DTK 01.01.01 | Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah |
| | | | | | | DTK 01.01.02 | Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai |
| | | | | | | DTK 01.01.03 | Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai |
| | | | | | | DTK 01.01.04 | Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai |
| | | | | DTK 01.02 | Meningkatkan peluang kerja sektor informal bagi wirausaha | DTK 01.02.01 | Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap banyak tenaga kerja/wirausaha |
| | | DTK 02 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | DTK 02.01 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan | DTK 02.02.01 | Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja |
| | | | | | | DTK 02.02.02 | Terlaksananya Pembinaan Norma Ketenagakerjaan |
| | | | | | | DTK 02.02.03 | Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial |

Sumber data : Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1313.1/INSP-C Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I. 1

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| No. | Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | | | | |
|-----|---|--|--|----------------------|---|---|
| | | Uraian | Output | Target Waktu Selesai | Penanggung Jawab | Praktik-praktik yang sudah ada tapi belum optimal |
| 1. | Melampirkan perencanaan kinerja dalam evidens yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan akurasi antar bidang dengan tugas dan fungsi. | Menyusun perencanaan kinerja dalam evidens yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan akurasi antar bidang dengan tugas dan fungsi dalam bentuk crosscutting. | Crosscutting Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1N0Z1g6HmfUJCzGAF8_XkEzY0yqR7C/view?usp=drive-link | Desember 2023 | Sub bag Perencanaan | Output sudah tercapai |
| 2. | Melampirkan SOP pengumpulan data kinerja. | Menyusun SOP pengumpulan data kinerja. | SOP pengumpulan data kinerja Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1PqE_4hri54Cv24FDkml55wJk45a.../view?usp=drive-link | Januari 2024 | Sub bag Perencanaan | Output sudah tercapai |
| 3. | Melampirkan Rapat money realisasi fisik dan keuangan (nota dinas, foto, notulen) | Melaksanakan rapat money realisasi fisik dan keuangan. | Rapat money realisasi fisik dan keuangan (nota dinas, foto, notulen) dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1PqE_4hri54Cv24FDkml55wJk45a.../view?usp=drive-link | Desember 2023 | Sub bag Perencanaan | Output sudah tercapai |
| 4. | Melampirkan SPT, foto dan laporan kegiatan. | Menyusun laporan kegiatan, SPT dan foto kegiatan. | SPT, foto dan laporan kegiatan dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1Jpa38GHEu20SC_ZH6C5M57p5aod11eech5o-dt6s/view?usp=drive-link | Desember 2023 | - Bidang Pelatihan dan Produktivitas - Bidang Hubungan Industrial dan Penyerapan Kerja - Bidang Penerimaan Tenaga Kerja | Output sudah tercapai |
| 5. | Melampirkan Dokumen tabel money realisasi fisik dan keuangan. | Menyusun money realisasi fisik dan keuangan Dinas Tenaga Kerja. | Dokumen tabel money realisasi fisik dan keuangan Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1N0Z1g6HmfUJCzGAF8_XkEzY0yqR7C/view?usp=drive-link | Desember 2023 | Sub bag Perencanaan | Output sudah tercapai |
| 6. | Melampirkan Evidens tentang informasi dalam laporan kinerja selaku mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. | Menyusun informasi laporan kinerja selaku mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi (LKIP). | LKIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1N0Z1g6HmfUJCzGAF8_XkEzY0yqR7C/view?usp=drive-link | Januari 2024 | Sub bag Perencanaan | Output sudah tercapai |

Sumber data : Matrik Tindak Lanjut LHE Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

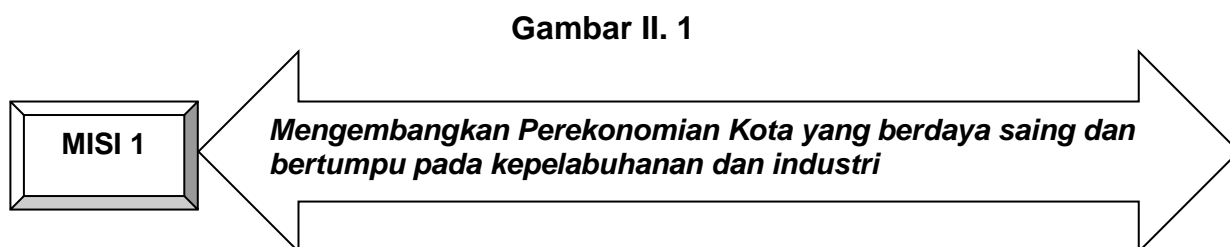
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”*.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, peningkatan keterampilan kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

| IKU WALI KOTA | | | IKU DINAS TENAGA KERJA | | |
|--|--|------------------------------|---|--|---|
| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Indikator RPJMD | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Indikator Renstra |
| Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai | Tingkat Pengangguran Terbuka | Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan |
| | | | | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan |
| | | | | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan |

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra Disnaker Tahun 2021-2026

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II. 2

Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

| Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) | | | |
|---|--|--|--|
| Misi ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat | Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah |
| | | | Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai |
| | | | Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai |
| | | | Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai |
| | | | Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap banyak tenaga kerja/wirausaha |
| | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan | Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Norma Ketenagakerjaan |
| | | | Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial |

Sumber data : Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

| NO | Sasaran Strategis | |
|----|--|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja Utama |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Meningkatnya Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja |
| 2 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota |

Sumber data : Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai 2021-2026

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja. | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10 % |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan | 10 % |
| 2. | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan | 20 % |

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2024

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp6.960.759.280 (*Enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain:

Tabel II.5
Program Kerja Dinas Tenaga Kerja

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|
| 1. | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp. 80.000.000 | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. 560.000.000 | APBD |
| 3. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp. 790.000.000 | APBD |
| 4. | Program Hubungan Industrial | Rp. 625.000.000 | APBD |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.905.759.280 | APBD |
| J U M L A H | | Rp. 6.960.759.280 | APBD |

Sumber Data : DPA Murni Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Perubahan Program kerja Dinas Tenaga Kerja

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|
| 1. | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp. 80.000.000 | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. 474.702.900 | APBD |
| 3. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp. 450.000.000 | APBD |
| 4. | Program Hubungan Industrial | Rp. 2.906.987.100 | APBD |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.672.979.104 | APBD |
| J U M L A H | | Rp. 9.584.669.104 | APBD |

Sumber data : DPPA Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi \times 100\%}{target}$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu:

Tabel III. 2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

| No | Nilai Capaian Kinerja | | Atribut |
|----|-----------------------|--|------------------------|
| | % | Keterangan Persentase | |
| 1 | 85% s.d 100% | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen | Sangat Berhasil |
| 2 | 70% s.d < 85% | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil |
| 3 | 55% s.d < 70% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen | Cukup Berhasil |
| 4 | < 55% | Di bawah lima puluh lima persen | Tidak Berhasil |

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel III. 3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024

| No | SASARAN | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | | |
|----|--|---|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| | URAIAN | INDIKATOR | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Predikat Capaian |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 4,36 % | 29,6 % | 10 % | 4,59 % | 45,9 % | Tidak Berhasil |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 41,75 % | 141,8 % | 10 % | 20,26 % | 202,6 % | Sangat Berhasil |
| 2 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 80,95 % | 269,83 % | 20 % | 40,62 % | 203,1 % | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Sangat Berhasil |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024

a. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan yang mendapatkan pelatihan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 10% realisasi sebesar 4,59%, tercapai 45,9% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 15% atau tercapai sebesar 29,6%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 16,3%.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Efisiensi Anggaran | 0,97% |
| Nilai Anggaran | Rp. 100.000.000,00 |
| Capaian 2024 | 45,9 % |
| Target | 10% |
| Realisasi | 4,59% |

b. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 10% realisasi sebesar 20,26%, tercapai 202,6% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 10% atau tercapai sebesar 141,8%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 60,8%.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Efisiensi Anggaran | 0,85% |
| Nilai Anggaran | Rp. 100.000.000,00 |
| Capaian 2024 | 202,6% |
| Target | 10% |
| Realisasi | 20,26% |

c. Indikator Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20% realisasi sebesar 40,62%, tercapai 203,1% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 30% atau tercapai sebesar 269,83%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 66,73%.

| | |
|--------------------|---------------------|
| Efisiensi Anggaran | 0,99% |
| Nilai Anggaran | Rp.2.906.987.100,00 |
| Capaian 2024 | 203,1% |
| Target | 20% |
| Realisasi | 40,62% |

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

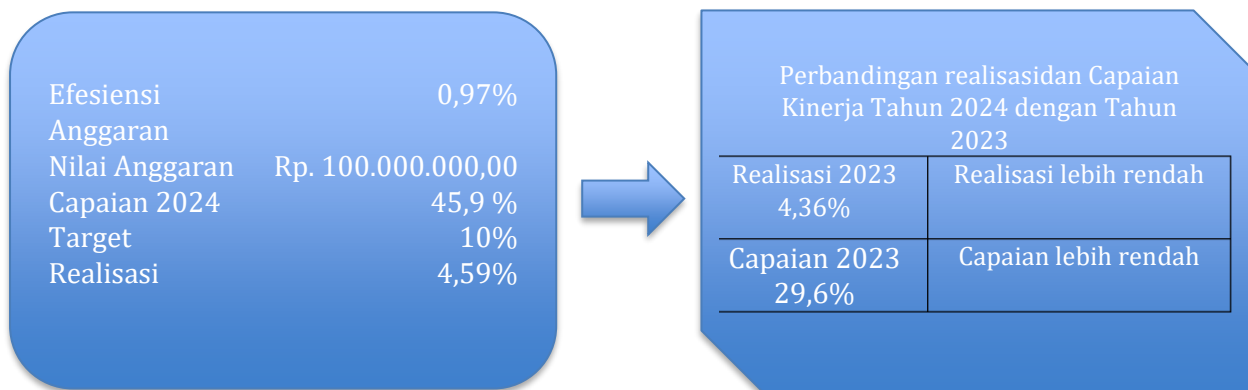
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | Realisasi | | | Capaian | | |
|-----|--|---|--------|------|------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 15% | 15% | 10% | 10,6% | 4,36% | 4,59% | 70,7% | 29,6% | 45,9% |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 10% | 10% | 10% | 12,64% | 41,75% | 20,26% | 126,4% | 141,8% | 202,6% |
| 2. | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 25% | 30% | 20% | 76,47% | 80,95% | 40,62% | 305,88% | 69,83% | 203,1% |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Indikator pertama adalah Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan dengan target pada Tahun 2022 adalah 15% berasal dari perhitungan jumlah peserta pelatihan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Pada Tahun 2022 jumlah peserta pelatihan sebanyak 278 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 70 orang, pelatihan MTU (Mobile Training Unit) sebanyak 12 paket dengan peserta 16 orang per paket pelatihan jumlah seluruh peserta pelatihan sebanyak 192 orang, dan pelatihan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) sebanyak 16 orang dari 2.627 Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2022 adalah 10,6% dengan capaian 70,7%. Pada Tahun 2023 jumlah peserta pelatihan sebanyak 80 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 64 orang dan pelatihan dengan anggaran mitra Disnaker sebanyak 16 orang dari 1.832 Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2023 adalah 4,36% dengan capaian 29,6%.

b. Tahun 2023 adalah 15% berasal dari perhitungan jumlah peserta pelatihan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Pada Tahun 2023 jumlah peserta pelatihan sebanyak 80 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 64 orang, pelatihan Pengelasan (Welder) Klasifikasi 3G CSR PT. Patra SK Dumai sebanyak 1 paket dengan peserta 16 orang dari 1.832 Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2023 adalah 4,36% dengan capaian 29,6%.

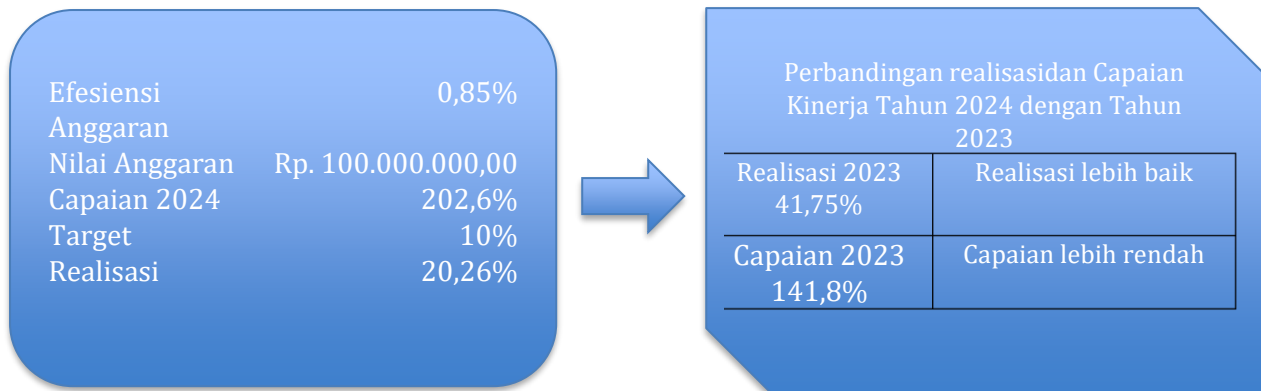
c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap untuk indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan capaian kinerja hanya tercapai untuk tahun 2024 sebesar 45,9% permasalahannya, yaitu kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan sehingga peserta yang dilatih disesuaikan dengan anggaran yang ada.



2. a. Indikator kedua adalah Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dengan target pada Pada Tahun 2022 Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 332 Orang dari 2.627 Orang yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja dengan target pada tahun 2022 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 12,64% dengan capaian 126,4%.

- b. Tahun 2023 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 41,75% dengan capaian 141,8%. Pada Tahun 2023 Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 568 Orang dari 1.756 Orang yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja dengan target pada tahun 2023 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 331 Orang dari 1.633 Orang yang terdaftar.

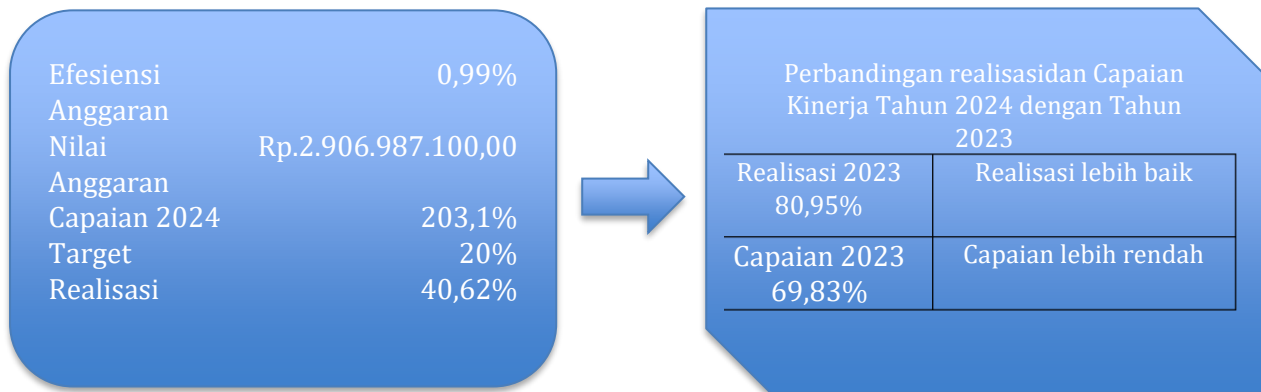
- c. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dengan target pada Tahun 2024 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2024 adalah 20,26% dengan capaian 202,6%.



- 3 a. Indikator ketiga adalah Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan dengan target pada Pada Tahun 2022 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 17 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 13 kasus atau 76,47 %. Sementara untuk tahun 2023 hingga bulan Desember tahun 2023 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 42 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 34 kasus atau 80,95 %.

- b. Pada Tahun 2023 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 42 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 34 kasus atau 80,95 %. Sementara untuk tahun 2024 hingga bulan Desember tahun 2024 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 32 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 19 kasus atau 40,62 %.

- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap kecuali untuk Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan menurun menjadi 20% dari sebelumnya yaitu 30%.



3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Tabel III. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

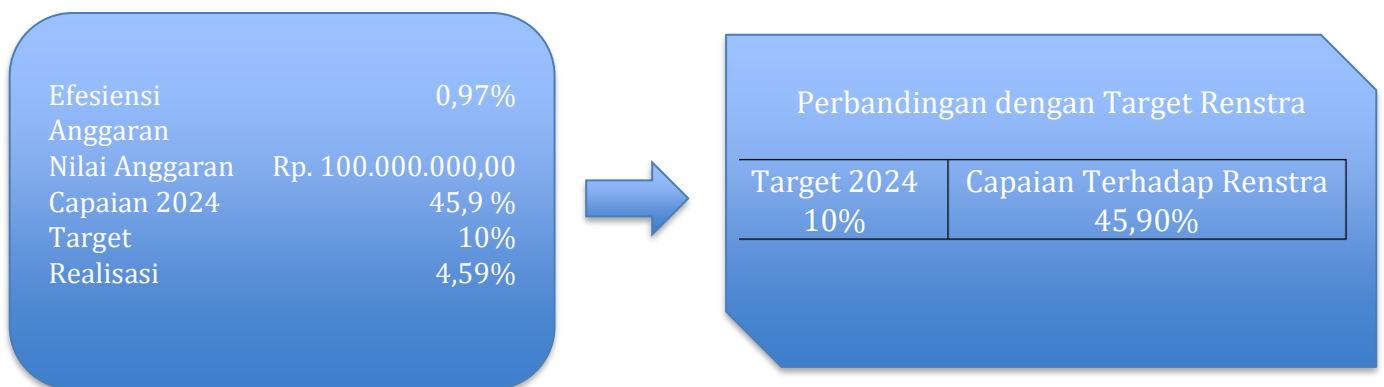
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|----|--|---|----------------------|-----------|------------------|
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10% | 4,59% | 45,90% |
| | | Persentase penempatan tenaga kerja | 45% | 20,26% | 45,02% |
| 2 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 100% | 40,62% | 40,62% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 100% | 100% | 100% |

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

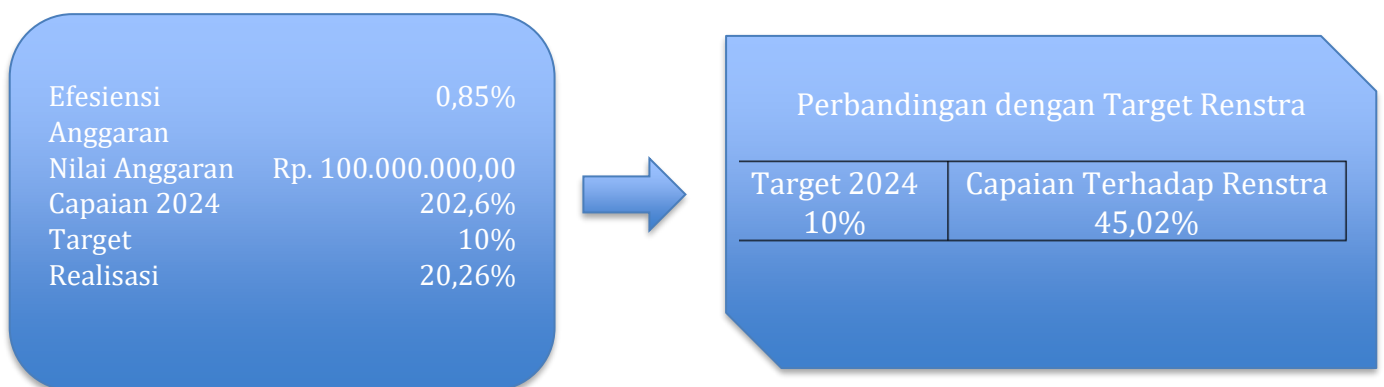
a. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan tahun 2024 sudah kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 10% dari target Renstra sebesar 10% dan terealisasi 4,59% pada tahun 2024.



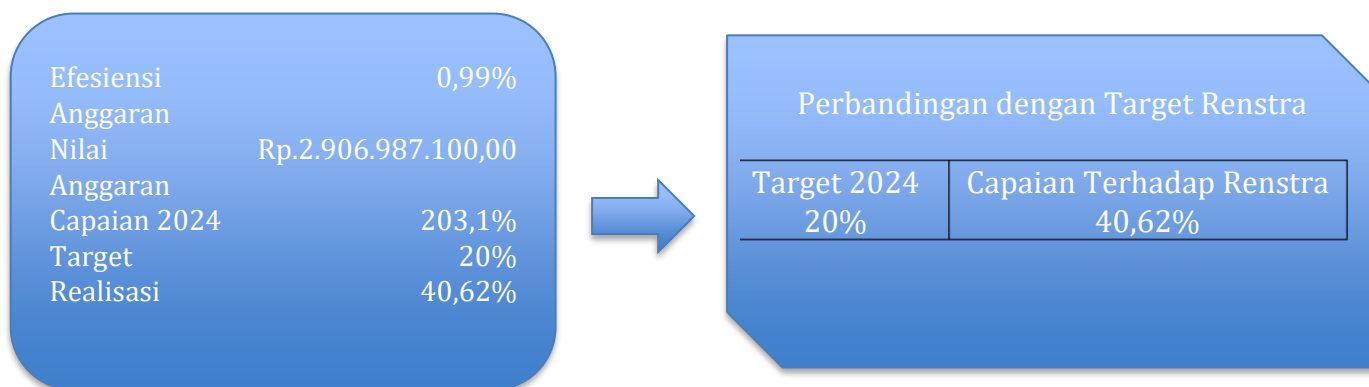
b. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Kerja tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 45% dari target Renstra sebesar 10% dan terealisasi 20,26% pada tahun 2024.



c. Indikator Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 20% dan terealisasi 40,62% pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel III. 6 berikut:

Tabel III. 6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2024 | REALISASI NASIONAL | KETERANGAN |
|----|--|---|----------------|--------------------|---|
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 4,59% | - | Tidak ada target nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 20,26% | - | |
| 2 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 40,62% | - | |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 100% | - | |

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 10% realisasi sebesar 4,59% tercapai 45,9% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 10% atau tercapai sebesar 29,6%, maka capaian tahun 2024 menurun sama dengan capaian tahun 2023.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya kebijakan yang mendukung pelatihan dan pengembangan tenaga kerja;
 - Ketersediaan instruktur atau pelatih yang berkualitas;
 - Infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai;
 - Analisis kebutuhan pelatihan yang baik untuk menentukan jenis pelatihan yang diperlukan;
 - Hubungan baik dengan industri terkait untuk mendukung program pelatihan; dan
 - Penyesuaian program pelatihan dengan perkembangan industri dan teknologi terbaru;
 - Adanya kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya alokasi anggaran untuk program pelatihan dapat menjadi hambatan utama; dan
 - Kekurangan sarana dan prasarana akan menghambat strategi yang telah direncanakan.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan adalah sebagai berikut: Identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan berdasarkan evaluasi hasil dan pengusulan penambahan anggaran untuk penambahan fasilitas pelatihan dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk penunjang pelatihan.

2. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

a. **Capaian kinerja** untuk Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 10% realisasi sebesar 20,26% tercapai 202,6% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 10% atau tercapai sebesar 141,8%, maka capaian tahun 2024 meningkat dari capaian tahun 2023.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya permintaan tinggi dari pasar tenaga kerja untuk keterampilan atau pekerjaan tertentu dapat mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja;
- Peningkatan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan persentase penempatan;
- Kerjasama yang baik antara lembaga penyedia tenaga kerja dengan industri dapat meningkatkan peluang penempatan.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya permintaan atau kelebihan penawaran tenaga kerja dalam suatu sektor dapat menyulitkan mencapai target penempatan;

- Kurangnya kualifikasi atau keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar dapat menghambat capaian target;
- Ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan lulusan atau tenaga kerja yang tersedia dapat menjadi hambatan.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan adalah sebagai berikut:

- Perhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pastikan program pendidikan dan pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar;
- Perlu peningkatan pelayanan publik melalui pusat info kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja dan optimalisasi peran pengantar kerja.
- Perhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pastikan program pendidikan dan pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar;
- Perlu peningkatan pelayanan publik melalui pusat info kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja dan optimalisasi peran pengantar kerja.

3. Indikator Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan

- a. **Capaian kinerja** untuk Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20% realisasi sebesar 40,62% tercapai 203,1% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 30% atau tercapai sebesar 69,83%, maka capaian tahun 2024 meningkat dari capaian tahun 2023.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Pada perencanaan Analisa jenis sosialisasi yang kurang akurat dan peserta sosialisasi masih ada yang belum sepenuhnya berpartisipasi;
- Pelanggaran terhadap kebijakan atau regulasi yang mengatur HI dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik;
- Masih adanya hubungan industrial yang kurang harmonis di perusahaan (antara pengusaha dan pekerja) serta masih adanya perusahaan yang belum menerapkan aturan norma ketenagakerjaan;
- Laporan tidak berdasarkan data valid yang perusahaan berikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan adalah sebagai berikut:

- Kurang survei dalam melihat kondisi hubungan industrial sehingga sosialisasi yang dilaksanakan kurang tepat sasaran;
- Ketidaksesuaian kebijakan dan regulasi dan terjadinya kasus hubungan industrial;
- Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja serta kasus hubungan industrial yang masih tinggi;
- Tidak mengikuti standar pelaporan dan laporan tidak bisa dijadikan untuk evaluasi kedepannya.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan adalah sebagai berikut:

- Lakukan analisis mendalam terhadap data perselisihan hubungan industrial untuk memahami penyebab utama dan tren yang mungkin telah berkontribusi pada penurunan tersebut;
- Masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya kontrak kerja antara pencari kerja dan pemberi kerja sehingga munculnya kasus Hubungan Industrial dan di selesaikan oleh Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang dapat menyelesaikan penyelesaian kasus perselisihan yang ada.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

| No. | IKU | Sasaran Program | indikator Program | Nama Program | Target Kinerja | Capaian Kinerja | Satuan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|-----|--|--|---|--|----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 10 | 45,9 | % | 100.000.000 | 96.685.000 | 100 |
| | Persentase penempatan tenaga kerja | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 10 | 202,6 | % | 100.000.000 | 96.685.000 | 100 |
| 2 | Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Dapat Diselesaikan perusahaan | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 20 | 203,1 | % | 2.265.025.400 | 2.250.863.700 | 100 |

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran |
|----|--|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 45,9% | 96,68 |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 202,6% | 84,96 |
| 2 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 203,1% | 99,37 |

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan* tingkat efisiensinya adalah 47,48% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (45,9%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (96,68%). Pada Tahun 2024 jumlah peserta pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 25 orang. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

Gambar III. 1

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TAHUN 2024

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Pelatihan Diksar Satpam Kualifikasi Gada Pratama



- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan* tingkat efisiensinya adalah 238,46% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (202,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (84,96%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

Gambar III. 2

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA TAHUN 2024

Pelatihan Pembuatan Saos
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota Sub.Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Tahun Anggaran 2024



- c. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan* tingkat efisiensinya adalah 204,39% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (203,1%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,37%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

Gambar III. 3

DOKUMENTASI KEGIATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2024

Penyerahan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja Rentan Kota Dumai Tahun 2024
Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja



3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 9
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kerja Kota Tahun 2024

| No | Jenis Penghargaan | Prestasi | Tingkat | Diberikan Oleh |
|-------|-------------------|----------|---------|----------------|
| NIHIL | | | | |

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 10
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

| Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 5.636.979.104 | Rp 5.093.361.855 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 23.553.000 | Rp 12.277.000 |
| | 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 16.349.100 | Rp 5.109.100 |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 7.203.900 | Rp 7.167.900 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 3.605.099.608 | Rp 3.469.834.082 |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 3.596.116.000 | Rp 3.460.907.474 |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 8.983.608 | Rp 8.926.608 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 36.000.000 | Rp - |
| | 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Rp 36.000.000 | Rp - |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 292.610.056 | Rp 158.476.689 |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 15.975.000 | Rp | 12.529.700 |
| | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 70.005.752 | Rp | 49.092.970 |
| | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp | 29.377.000 | Rp | 25.233.500 |
| | 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp | 7.576.400 | Rp | 3.029.067 |
| | 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp | 5.050.000 | Rp | 1.851.000 |
| | 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 164.625.904 | Rp | 66.740.452 |
| | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 489.544.796 | Rp | 432.829.000 |
| | 1 | Pengadaan Mebel | Rp | 66.057.200 | Rp | 29.390.000 |
| | 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 423.487.596 | Rp | 403.439.000 |
| | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 855.824.544 | Rp | 761.775.075 |
| | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 5.000.000 | Rp | 5.000.000 |
| | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 141.769.704 | Rp | 131.201.435 |
| | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 709.054.840 | Rp | 625.573.640 |
| | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 370.347.100 | Rp | 258.170.009 |
| | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 189.300.000 | Rp | 155.510.009 |
| | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 39.200.000 | Rp | 24.970.000 |
| | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 141.847.100 | Rp | 77.690.000 |
| 2 | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Rp | 80.000.000 | Rp | 40.071.272 |
| | 1 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Rp | 80.000.000 | Rp | 40.071.272 |
| | 1 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Rp | 80.000.000 | Rp | 40.071.272 |
| 3 | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp | 474.702.900 | Rp | 316.766.850 |
| | 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Rp | 200.000.000 | Rp | 196.635.000 |
| | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Rp | 100.000.000 | Rp | 96.685.000 |
| | 2 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Rp | 100.000.000 | Rp | 99.950.000 |
| | 2 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Rp | 81.358.000 | Rp | 8.450.000 |
| | 1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Rp | 81.358.000 | Rp | 8.450.000 |
| | 3 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Rp | 67.312.000 | Rp | 42.770.500 |

| | | | | | | |
|--|----------|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | 1 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Rp | 67.312.000 | Rp | 42.770.500 |
| | 4 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Rp | 59.657.900 | Rp | 27.440.000 |
| | 1 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Rp | 59.657.900 | Rp | 27.440.000 |
| | 5 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 66.375.000 | Rp | 41.471.350 |
| | 1 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | 66.375.000 | Rp | 41.471.350 |
| | 4 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Rp | 450.000.000 | Rp | 157.081.280 |
| | 1 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 250.000.000 | Rp | 104.572.280 |
| | 1 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Rp | 100.000.000 | Rp | 19.612.280 |
| | 2 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Rp | 50.000.000 | | Rp - |
| | 3 | Perluasan Kesempatan Kerja | Rp | 100.000.000 | Rp | 84.960.000 |
| | 2 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Rp | 100.000.000 | Rp | 52.509.000 |
| | 1 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Rp | 50.000.000 | Rp | 34.900.000 |
| | 2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Rp | 50.000.000 | Rp | 17.609.000 |
| | 3 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 100.000.000 | | Rp - |
| | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Rp | 100.000.000 | | Rp - |
| | 5 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp | 2.906.987.100 | Rp | 2.702.912.716 |
| | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 370.693.400 | Rp | 305.332.795 |
| | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Rp | 75.000.000 | Rp | 68.970.345 |
| | 2 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Rp | 54.593.400 | Rp | 48.962.450 |
| | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Rp | 241.100.000 | Rp | 187.400.000 |
| | 2 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 2.536.293.700 | Rp | 2.397.579.921 |
| | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 75.000.000 | Rp | 47.661.101 |
| | 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 75.000.000 | Rp | 56.465.520 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | 3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Rp | 46.268.300 | Rp | 38.074.600 |
| | | 4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 75.000.000 | Rp | 4.515.000 |
| | | 5 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Rp | 2.265.025.400 | Rp | 2.250.863.700 |
| J U M L A H | | | | Rp | 9.548.669.104 | Rp | 8.310.193.973 |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. LKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2024, Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja 2024 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang terdiri atas 3 Kinerja Utama dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut:

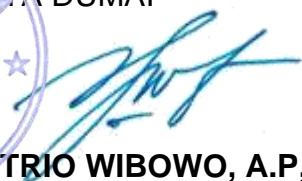
1. Pada Indikator Kinerja Utama *Besaran Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan* persentase capaian kinerja tahun 2024 (45,9%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%). Dari target 10% bisa terealisasi 4,59% dan termasuk kategori **TIDAK BERHASIL**;
2. Pada Indikator Kinerja Utama *Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan* persentase capaian kinerja tahun 2024 (202,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%). Dari target 10% bisa terealisasi 20,26% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**;
3. Pada Indikator Kinerja Utama *Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan* persentase capaian kinerja tahun 2024 (203,1%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%). Dari target 20% bisa terealisasi 40,62% dan termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai 15 Januari 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI




SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

LAMPIRAN LKIP

TAHUN 2024

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu
Misi : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
Sasaran : Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja

| Tujuan | | | | | | | | | | Sasaran | | | | | | | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | | Ket | | |
|---|---|---|--------------|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|------|--|---|--|---------|
| Uraian | Indikator | Formula Perhitungan | Kondisi Awal | | Target | | | | | Uraian | Indikator | Formula Perhitungan | Kondisi Awal | | Target | | | | | Strategi | | Kebijakan | Program |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dibagi dengan Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100% | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Persentase | Jumlah Pencari Kerja yg Dilatih dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100% | - | - | 70,70% | 29,60% | 45,90% | - | - | Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat | - Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah - Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | |
| | | | | | | | | | | Penempatan Tenaga Kerja | Jumlah Pencari Kerja yg Ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100% | - | - | 126,40% | 141,80% | 202,60% | - | - | | - Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai - Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai - Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap banyak tenaga kerja/wirausaha | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | |
| | | | | | | | | | | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan | Jumlah Kasus yg diselesaikan dg PB dibagi Jumlah Kasus yg Dicatatkan dikali 100% | - | - | 305,88% | 305,88% | 203,10% | - | - | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan | - Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja - Terlaksananya Pembinaan Norma Ketenagakerjaan - Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | |



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI,

SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770524 199602 1 002

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan 2024 |
|-----------|--|---|---------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | % | 10 |
| 2 | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | % | 10 |
| 3 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | % | 20 |

Dumai, Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SATRIO WIBOWO, A.P. M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

SATRIO WIBOWO, A.P. M.Si
NIP. 19770524 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10 |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 10 |
| 2. | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 20 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|---|----------------------|------------|
| 1 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. 560.000.000 | |
| 2 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp. 790.000.000 | |
| 3 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp. 625.000.000 | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.905.759.280,00 | Pendukung |





**PENETAPAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**
Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA


SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

PIHAK PERTAMA


BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si
Pembina
NIP. 19700327 200502 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024


| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|--|------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 14.999.100 |
| 2. | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 77.760.000 |
| 3. | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 65 Unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 39.200.000 |
| 4. | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermoto yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 10 Unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 189.300.000 |
| 5. | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 11 Unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 46.178.600 |
| 6. | | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 10 Unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 29.607.200 |
| 7. | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 103.908.000 |
| 8. | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 8.983.608 |
| 9. | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 3 Laporan | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 8.553.900 |
| 10. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayangan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 667.617.640 |
| 11. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 118.909.800 |
| 12. | | Jumlah Paket Komoonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 9.975.000 |
| 13. | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 70.005.752 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|---------|--|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 14. | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 24.377.000 |
| 15. | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 5.576.400 |
| 16. | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 5.050.000 |
| 17. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 5.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 1.425.000.000 |

KEPALA,


 SATRIO WIBOWO, A.P., M.Si
 NIP. 19770524 199602 1 002

SEKRETARIS,


 BAMBANG SURIANTO, S.T., M.Si
 NIP. 19780327 200502 1 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T**
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

Nama : **SATRIO WIBOWO, AP, M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

SATRIO WIBOWO, AP, M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

PIHAK PERTAMA

AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ITA ROSITA, S.Ag, M.Si**
Jabatan : INSTRUKTUR

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

Nama : **AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T**
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002

PIHAK PERTAMA

ITA ROSITA, S.Ag, M.Si
NIP. 19750101 200003 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|---------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembelajaran serta pengembangan pelatihan | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran pelatihan atau pengukuran produktivitas individu | Dokumen | 4 |
| 2. | | Melakukan penyusunan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |
| 3. | | Melakukan penyusunan program peningkatan produktivitas bagi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat | Dokumen | 3 |
| 4. | | Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit Kompetensi (lesson plan) pada level teknis | Dokumen | 3 |
| 5. | | Melaksanakan perbaikan peralatan pelatihan | Dokumen | 4 |
| 6. | | Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah | Dokumen | 4 |
| 7. | | Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah | Dokumen | 3 |
| 8. | | Mengembangkan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002

PIHAK PERTAMA



ITA ROSITA, S.Ag, M.Si
NIP. 19750101 200003 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WENI SYAMSUL, S.T**
Jabatan : INSTRUKTUR

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

Nama : **AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T**
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002

PIHAK PERTAMA

WENI SYAMSUL, S.T
NIP. 19800912 200501 2 009

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|---------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembelajaran serta pengembangan pelatihan | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran pelatihan atau pengukuran produktivitas individu | Dokumen | 4 |
| 2. | | Melakukan penyusunan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |
| 3. | | Melakukan penyusunan program peningkatan produktivitas bagi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat | Dokumen | 3 |
| 4. | | Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi (lesson plan) pada level teknis | Dokumen | 3 |
| 5. | | Melaksanakan perbaikan peralatan pelatihan | Dokumen | 4 |
| 6. | | Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah | Dokumen | 4 |
| 7. | | Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah | Dokumen | 3 |
| 8. | | Mengembangkan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002

PIHAK PERTAMA



WENI SYAMSUL, S.T
NIP. 19800912 200501 2 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EVIE ROZA FITRIAH, S.E**
Jabatan : INSTRUKTUR

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

Nama : **AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T**
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002

PIHAK PERTAMA

EVIE ROZA FITRIAH, S.E
NIP. 19840703 201001 2 015

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|---------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembelajaran serta pengembangan pelatihan | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran pelatihan atau pengukuran produktivitas individu | Dokumen | 4 |
| 2. | | Melakukan penyusunan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |
| 3. | | Melakukan penyusunan program peningkatan produktivitas bagi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat | Dokumen | 3 |
| 4. | | Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit Kompetensi (lesson plan) pada level teknisi | Dokumen | 3 |
| 5. | | Melaksanakan perbaikan peralatan pelatihan | Dokumen | 4 |
| 6. | | Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah | Dokumen | 4 |
| 7. | | Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah | Dokumen | 3 |
| 8. | | Mengembangkan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200112 1 002

PIHAK PERTAMA



EVIE ROZA FITRIAH, S.E
NIP. 19840703 201001 2 015



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AGUS PURNOMO, S.E**
Jabatan : **ANALIS TENAGA KERJA**

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

Nama : **AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200003 2 003

PIHAK PERTAMA

AGUS PURNOMO, S.E
NIP. 19910526 202203 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|--------------------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan kualitas daya saing pencari kerja lokal serta meningkatkan minat para pencari kerja dalam industry dan berwirausaha | 1.1 Penyiapan data dan bahan proses pemagangan dan produktivitas tenaga kerja 2.1 Memfasilitasi antara peserta pemagangan dan perusahaan tempat magang | Dokumen Dokumen | 6 6 |
| 2. | Mendalami pengetahuan, keterampilan dan keahlian dibidang kewirausahaan | Penyiapan bahan informasi pemagangan dan pendataan peserta magang berdasarkan wilayah kecamatan | Dokumen | 6 |
| 3. | Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan | Penyiapan data dan bahan dalam rangka penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan | Dokumen | 1 |
| 4. | Melakukan verifikasi usulan pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang di verifikasi | Dokumen | 1 |
| 5. | Mengadakan pelatihan kepada pencari kerja sesuai standar kompetensi | Mengadakan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi | Dokumen | 30 |
| 6. | Melakukan sertifikasi kepada para pencari kerja | Mengadakan pelatihan sertifikasi bagi pencari kerja | Dokumen | 16 |
| 7. | Melakukan pendataan mengenai kebutuhan pelatihan tenaga kerja | Melakukan pendataan mengenai kebutuhan pelatihan tenaga kerja | Dokumen | 1 |
| 8. | Melakukan pendataan kepada tenaga kerja yang sudah mempunyai sertifikasi | Tersedianya data peserta pelatihan yang sudah tersertifikasi | Dokumen | 1 |

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA



AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T
NIP. 19720228 200003 2 003

PIHAK PERTAMA



AGUS PURNOMO, S.E
NIP. 19910526 202203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRY MARTIN, SE.M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SATRIO WIBOWO, A.P.M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI


SATRIO WIBOWO, AP. M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


ANDRY MARTIN, SE. M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|---|------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan Pasar kerja | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 20 orang | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Rp 80.000.000 ✓ |
| 2 | | jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku | 10 lembaga | Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 50.000.000 ✓ |
| 3 | | jumlah tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD | 30 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 50.000.000 ✓ |
| 4 | | jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub) | 200 orang | Pengelolaan informasi pasar kerja | Rp 50.000.000 ✓ |
| 5 | | jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi | 15 prang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 6 | | jumlah PMI purna yang diberdayakan | 20 orang | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 7 | | jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online | 2 dokumen | Pengelolaan informasi pasar kerja | Rp 50.000.000 |
| 8 | | jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 ✓ |
| 9 | | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan diingatkan kompetensinya | 35 orang | pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 10 | | jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 11 | | jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL | 20 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 90.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 870.000.005 |

KEPALA,



SATRYO WIBOWO, A.P., M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRAWATI, S.Sos

Jabatan : JF. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDRY MARTIN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

PIHAK PERTAMA,
JF. PENGANTAR KERJA
AHLI MUDA

IRAWATI, S.Sos
NIP. 19711007 199403 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|---|------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan Pasar kerja | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 20 orang | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Rp 80.000.000 |
| 2 | | jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku | 10 lembaga | Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 50.000.000 |
| 3 | | jumlah tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD | 30 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 50.000.000 |
| 4 | | jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub) | 200 orang | Pengelolaan informasi pasar kerja | Rp 50.000.000 |
| 5 | | jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 330.000.000 |

KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

JF. Pengantar Kerja Ahli Muda


IRAWATI, S.Sos
NIP. 19711007 199403 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL, S.I.P

Jabatan : ANALIS BAHAN PENEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDRY MARTIN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

PIHAK PERTAMA,
ANALIS BAHAN PENEMPATAN
KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

ISMAIL, S.I.P
NIP. 19761206 200604 1 010


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran


: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi | 10 berkas |
| 2 | koordinasi pembinaan dan pengembangan bursa kerja khusus pada sekolah kejuruan | 10 berkas |
| 3 | menyiapkan bahan pelayanan administrasi kartu pencari kerja | 4 berkas |
| 4 | pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. | 6 berkas |
| 5 | mengelola data perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi | 5 berkas |

KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

PELAKSANA,
ANALIS BAHAN PENEMPATAN KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA


ISMAIL, S.I.P
NIP. 19761206 200604 1 010



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS,

SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 Terciptanya situasi kerja yang kondusif | 3 Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan | 15 Perusahaan 5 Perusahaan 1 Laporan | 4 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5 75.000.000 75.000.000 125.000.000 |
| 4 | | Jumlah Perselisihan yang dicegah | 15 Perkara | | 75.000.000 |
| 5 | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 40 Perkara | | 75.000.000 |
| 6 | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja | PENCEGAHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.000.000 |
| 7 | | Jumlah LKS Tripartit yang dibina | 1 Lembaga | | 75.000.000 |
| 8 | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 50 orang | | 75.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | 625.000.000 |

KEPALA,



SATRYO WIBOWO, A.P., M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos

NIP. 19780102 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DAHLAN SYAFTERA, S.Sos

Jabatan : JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
AHLI MUDA

DAHLAN SYAFTERA, S.Sos
NIP. 19750418 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|---|---|---------------|--|-----------------|
| | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | | Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di NLPK Online | 15 Perusahaan | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Rp. 75.000.000 |
| 2 | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 5 Perusahaan | Pendafatiran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | Rp. 75.000.000 |
| 3 | Terciptanya Situasi Kerja yang Kondusif | Terdakannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 50 Orang | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Rp. 76.000.000 |
| 5 | | Jumlah Pengetahuan yang Didapat | 15 Perkara | Pencogohan Pengetahuan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kespemlingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 75.000.000 |
| 6 | | Jumlah Perkara Pengetahuan yang Terealisasi | 40 Perkara | Penyelesaian Perusahaan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kespemlingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 75.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp. 375.000.000 |

KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN


PRINKADI, S.Sos
N.P. 19780102 200112 1 003

JF, Mediator Hubungan Industrial ARI Muda,



DAHLAN SYAIFERA, S.Sos
N.P. 19750418 200904 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BOBSIDES, S.T

Jabatan : JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
JF. MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL AHLI MUDA

BOBSIDES, S.T
NIP. 19720527 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Tahun : Murni 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|---|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | 1 Jumlah LKS Tripartit yang dibina 2 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi | 1 Lembaga dan Serikat Pekerja | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 75.000.000 50.000.000 |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA


AFRINAIDI, S.Sos

NIP. 19780102 200112 1 003

JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
AHLI MUDA


BOBSIDES, STI

NIP. 19720527 200003 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MULYANI, SH

Jabatan : JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
JF. MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL AHLI MUDA

MULYANI, SH
NIP. 19840101 201001 2 042

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------------------|--|--|------------|---|--------------------|
| 1 | 2 Terciptanya situasi kerja yang kondusif | 3 Jumlah Perselisihan yang dicegah | 15 Perkara | 4 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 75.000.000 |
| | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 40 Perkara | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | 150.000.000 |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA


AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL


MULYANI, S.H
NIP. 19840101 201001 2 042



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : RIKHI PERMATA PUTRA, SKM

Jabatan : Analis Bahan Persyaratan Kerja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

RIKHI PERMATA PUTRA, SKM
NIP. 19860522 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD 2024

| NO | SASARAN 2 | TARGET 3 |
|----|--|-------------|
| 1 | (disesuaikan dengan pekerjaan) | |
| 1 | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online | 6 Surat |
| 2 | Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 2 Surat |
| 3 | Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PIPKE, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Surat |
| 4 | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3 Surat |
| 5 | Terlaksananya administrasi syarat kerja terhadap surat balasan dan pemomoran registrasi dari permohonan pengesahan pencatatan PKWT, PKWTT, KHL dan lainnya antara pekerja dan perusahaan | 55 Surat |
| 6 | Tersedianya data pekerjaan/kegiatan data pencatatan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan | 55 Surat |
| 7 | Tersedianya administrasi persuratan persyaratan kerja pelaporan perjanjian pekerjaan aih daya | 55 Surat |
| 8 | Tersedianya administrasi persuratan persyaratan kerja Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | 6 Surat |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA


AFRIDAIDE, S.Sos
NIP. 19780102 200110 1 0003

PEDAKSANA


RUKHI PRIBADI-PUTRA, SKM
NIP. 19860522 201001 1 0068



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADE JUMIANTI, A.Md

Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

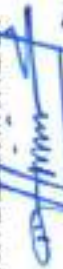
ADE JUMIANTI, A.Md
NIP. 19780418 201001 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DIMAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | (Eksklusikan dengan pekerjaan) |
| 1 | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online | 6 Surat |
| 2 | Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 2 Surat |
| 3 | Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Surat |
| 4 | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3 Surat |
| 5 | Terlaksananya administrasi syarat kerja terhadap surat balasan dan penomoran registrasi dari permohonan pengesahan pencatatan PKWT, PKWTT, KHL dan lainnya antara pekerja dan perusahaan | 60 Surat |
| 6 | Tersedianya data pekerja/rekapan data pencatatan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan | 60 Surat |
| 7 | Tersedianya administrasi persuratan persyaratan kerja pelaporan perjanjian pekerjaan alih daya | 60 Surat |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSARAFATAN KERJA



AFDONALDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PELAKSANA



ADE JUMIANDI, A.Md
NIP. 19780418 201001 2 014



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KATHERINA SIAHAAN, SE

Jabatan : ANALIS TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

KATHERINA SIAHAAN, SE
NIP. 19870920 200904 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tersedianya Pengesahaan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh | 15 Surat |
| 2 | Terlaksananya Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh | 10 Kegiatan |
| 3 | Tersedianya Pencatatan LKS Bipartit | 15 Surat |
| 4 | Terlaksananya Pembinaan LKS Bpartit | 10 Kegiatan |
| 5 | Tersedianya bahan rapat Dewan Pengupahan | 1 Dokumen |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos

NIP. 19780102 200112 1 003

PELAKSANA,



KATHERINA SIAHAAN, SE

NIP. 19670920 200904 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GURNIAWAN

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

GURNIAWAN
NIP. 19890429 201503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tersedianya surat panggilan klarifikasi/mediasi | 24 Surat |
| 2 | Tersedianya surat Risalah, Perjanjian Bersama maupun anjuran | 25 Surat |
| 3 | Terlaksananya dokumentasi saat sidang klarifikasi/mediasi | 48 foto |
| 4 | Terlaksananya distribusi surat panggilan Klarifikasi/Mediasi kepada para pihak | 24 lembar pengantar |
| 5 | Tersedianya bahan rapat Dewan Pengupahan | 1 dokumen |
| 6 | Tersedianya Surat Edaran Upah Minimum Kota Dumai Tahun 2025 | 1 dokumen |
| 7 | Tersedianya Rekapitan Kasus Perselisihan hubungan industrial perbulan dan pertahun | 1 dokumen |
| | | |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PELAKSANA,



GURNIAWAN
NIP. 19890429 201503 1 004



**PENETAPAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.SI**

Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

BAMBANG SURIANTO, S.T,M.Si

Pembina

NIP. 19700327 200502 1 004

PIHAK PERTAMA

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Penata Tk.I

NIP. 19760225 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

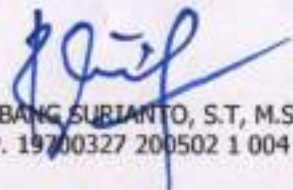
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|---|--|------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 687.617.640 |
| 2. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp 118.909.800 |
| 3. | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 Paket | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Rp 9.975.000 |
| 4. | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3 Paket | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 70.005.752 |
| 5. | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Paket | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 24.377.000 |
| 6. | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 5.576.400 |
| 7. | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 5.050.000 |
| 8. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 5.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 906.511.592 |

SEKRETARIS,

KASUBBAG TATA USAHA,


BAMBANG SUBIANTO, S.T, M.Si
NIP. 19700327 200502 1 004


WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001



**PENETAPAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDI SUSANTO, S.E, M.M,Ak**
Jabatan : **JF. PERENCANA AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **BAMBANG SURIANTO, S.T, M.SI**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**
Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

BAMBANG SURIANTO, S.T,M.SI
Pembina
NIP. 19700327 200502 1 004

PIHAK PERTAMA

EDI SUSANTO, S.E, M.M,Ak
Pembina
NIP. 19760225 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran


: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|--|------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 14.999.100 |
| 2. | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | Pemeliharaan / Regabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 77.760.000 |
| 3. | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 65 Unit | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 39.200.000 |
| 4. | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermoto yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 10 Unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan | Rp 189.300.000 |
| 5. | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 11 Unit | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 46.176.600 |
| 6. | | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 10 Unit | Pengadaan Mebel | Rp 29.607.200 |
| 7. | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD | Rp 103.908.000 |
| 8. | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 8.983.608 |
| 9. | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja | Rp 8.553.900 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 518.488.408 |

SEKRETARIS,


BAMBANG SURTANTO, S.T, M.Si
NIP. 19700327 200502 1 004

JF. PERENCANA AHLI MUDA


EDI SUSANTO, S.E, M.M, Ak
NIP. 19710306 200212 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADANIS, A.Md

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN SYAPARUDDIN, ST, M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***


Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG TATA USAHA


WAN SYAPARUDDIN, ST, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA,
BENDAHARA PENGELUARAN


RAHMADANIS, A.Md
NIP. 19810317 200604 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | (diisi sasaran tupoksi dari atasan langsung) | (disesuaikan dengan pekerjaan) |
| 1 | Tersedianya Surat Perintah Pembayaran (SPP), UP/GU/TU dan SPP LS | 50 Dokumen |
| 2 | Tersedianya Transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan kedalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS | 12 Dokumen |
| 3 | Terlaksananya penyetoran pajak-pajak | 12 Dokumen |
| 4 | Terlaksananya pembayaran atas tagihan/kwitansi | 500 kwitansi |
| 5 | Tersedianya register penutupan kas | 12 berkas |
| 6 | Tersedianya laporan/surat pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) | 12 Dokumen |
| 7 | Terlaksananya Pemeriksaan Kas setiap bulannya | 12 Dokumen |
| | | |

KASUBBAG TATA USAHA,


WAN SYAEARUDDIN, ST, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA,


RAHMADANIS, A.Md
NIP. 19810317 200604 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NINA NOFIANA, S.Sos

Jabatan : ANALIS TATA USAHA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

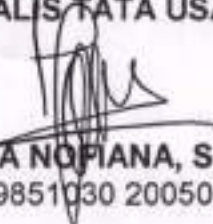
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG TATA USAHA


WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA,
ANALIS TATA USAHA


NINA NOFIANA, S.Sos
NIP. 19851030 200501 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran


: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Melakukan Pemberian Dukungan Administrasi Ketatausahaan, kerumahtanggaan, Kepegawaian, arsip dan dokumentasi. | Menyiapkan Berkas dan Mengetik SK Kenaikan Gaji Berkala ASN |
| 2. | | Meyiapkan Berkas, Memberikan Stempel Legalisir serta membuat pengantar usulan kenaikan pangkat |
| 3. | | Mencatat disposisi dan mendistribusikan surat masuk |
| 4. | | Mengarsipkan Surat Masuk |
| 5. | | Membuat dan menyiapkan SPJ Kegiatan |

KASUBBAG TATA USAHA


WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA,


NINA NOFIANA, S.Sos
NIP. 19851030 200501 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISMA AKURNIAWAN

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG TATA USAHA

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA,
PENGADMINISTRASI UMUM

RISMA AKURNIAWAN
NIP. 19901014 201503 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Melakukan Pemberian Dukungan Administrasi Ketatausahaan, kerumahtangaan, Kepegawaian, arsip dan dokumentasi. | Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN |
| 2. | | Membuat dan Menyiapkan absen harian dan Rekap bulanan PNS dan TKS |
| 3. | | Menerima dan mengetik permohonan cuti PNS |
| 4. | | Mengetik Surat Keluar |
| 5. | | Membantu menyiapkan surat perjanjian TKPK |

KASUBBAG TATA USAHA



WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.SI
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA,



RISMA AKURNIAWAN
NIP. 19901014201503 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZKIA AYUTRI MANUHUTU, S.E.

Jabatan : PENATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.SI.

Jabatan : KASUBBAG. TATA USAHA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG. TATA USAHA

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.SI
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA,
PENATA LAPORAN KEUANGAN

REZKIA AYUTRI MANUHUTU, S.E.
NIP. 19911126 201902 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Seluan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tetapkannya penyajian bahan penyusunan laporan keuangan | 1 laporan |
| 2 | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban barang milik daerah | 2 laporan |
| 3 | Tetapkannya rekonstruksi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | 4 laporan |
| 4 | Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah | 2 laporan |
| 5 | Tersusunnya dokumen pemantauan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | 3 dokumen |
| 6 | Tersusunnya dokumen penilaian mandiri reformasi birokrasi perangkat daerah | 3 dokumen |

KASUBAG, TATA USAHA



WAN SYAPRUDDIR, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA



REZKIA AYUTRI MANJUHUTU, S.E.
NIP. 19911126 201902 2 006

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIO WBOWO, A.P, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : Wali Kota Dumai

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

SATRIO WBOWO, A.P, M.Si

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja. | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | 10 |
| | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 10 |
| 2. | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 20 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|-------------------|------------|
| 1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp. 474.702.900 | |
| 2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Rp. 450.000.000 | |
| 3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp. 2.906.987.100 | |
| Jumlah | Rp. 3.831.690.000 | |



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

PIHAK PERTAMA


BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19700327 200502 1 004


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|--|------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 14.999.100 |
| 2. | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 77.760.000 |
| 3. | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 65 Unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 39.200.000 |
| 4. | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 10 Unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 189.300.000 |
| 5. | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 11 Unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 46.176.600 |
| 6. | | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 10 Unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 29.607.200 |
| 7. | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 103.908.000 |
| 8. | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 8.983.608 |
| 9. | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 8.553.900 |
| 10. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Felyeran Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 667.617.640 |

| NO | SABARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|---------|---|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 11. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 118.909.800 |
| 12. | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 15.975.000 |
| 13. | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 70.005.752 |
| 14. | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 29.377.000 |
| 15. | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 7.578.400 |
| 16. | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 5.050.000 |
| 17. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 5.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 1.438.000.000 |

KERALA


SATRIO WIBOWO, A.P., M.Si
NIP. 770524 199602 1 002

SEKRETARIS


BAMBANG SURIANTO, S.T., M.Si
NIP. 19700327 200502 1 004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SUSANTO, S.E, MM, Ak
Jabatan : JF. PERENCANA AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

BAMBANG SURIANTO, S.T.M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19700327 200502 1 004

PIHAK PERTAMA

EDI SUSANTO, S.E, MM.Ak
Pembina
NIP. 19710306 200212 1 002


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran


: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|--|------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 14.999.100 |
| 2. | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | Pemeliharaan / Regabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 77.760.000 |
| 3. | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 65 Unit | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 39.200.000 |
| 4. | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 10 Unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan | Rp 189.300.000 |
| 5. | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 11 Unit | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 46.176.600 |
| 6. | | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 10 Unit | Pengadaan Mebel | Rp 29.607.200 |
| 7. | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 103.908.000 |
| 8. | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 8.983.608 |
| 9. | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Rp 8.553.900 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 518.488.408 |

SEKRETARIS


BAMBANG SURIANTO, S.T., M.Si
NIP. 19700327 200502 1 004

JF. PERENCANA AHLI MUDA


EDI SUSANTO, S.E., M.M., Ak
NIP. 19710306 200212 1 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700327 200502 1 004

PIHAK PERTAMA

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Penata TK.I

NIP. 19780225 200904 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|--|------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 687.617.840 |
| 2. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp 141.769.704 |
| 3. | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 Paket | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 15.975.000 |
| 4. | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3 Paket | Penyediaan Peratatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 70.005.752 |
| 5. | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Paket | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 29.377.000 |
| 6. | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 7.576.400 |
| 7. | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 5.050.000 |
| 8. | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 5.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 942.371.496 |

SEKRETARIS

BAMBANG SURIANTO, S.T, M.Si
NIP. 19700327 200502 1 004

KASUBBAG TATA USAHA,

WAN SYARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19750225 200904 1 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINA NOFIANA, S.Sos

Jabatan : ANALIS TATA USAHA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA

NINA NOFIANA, S.Sos

Penata

NIP. 19851030 200501 2 002


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

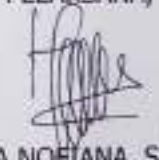
: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Melakukan Pemberian Dukungan Administrasi Ketatausahaan, kerumahtanggaan, Kepegawaian, arsip dan dokumentasi. | Menyiapkan Berkas dan Mengetik SK Kenaikan Gaji Berkala ASN |
| 2. | | Meyiapkan Berkas, Memberikan Stempel Legalisir serta membuat pengantar usulan kenaikan pangkat |
| 3. | | Mencatat disposisi dan mendistribusikan surat masuk |
| 4. | | Mengarsipkan Surat Masuk |
| 5. | | Membuat dan menyiapkan SPJ Kegiatan |

KASUBBAG TATA USAHA


WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA,


NINA NOFIANA, S.Sos
NIP. 19851030 200501 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADANIS, S.E
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si.
Jabatan : KASUBBAG. TATA USAHA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA,

RAHMADANIS, S.E
NIP. 19810317 200604 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Unit Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Sumber Anggaran : APBD Perubahan 2024

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN |
|----|--|---|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan | Tersedianya Surat Perintah Pembayaran (SPP), UP/GU/TU dan SPP LS | 1 Jumlah Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS yang tersedia | 1 Dok | Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS yang tersedia |
| | | Tersedianya Transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan kedalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS | 2 Jumlah Transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan kedalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS | 1 Dok | Melakukan Transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan kedalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS |
| | | Terlaksananya penyetoran pajak-pajak | 3 Jumlah Bukti penyetoran pajak-pajak yang tersedia | 1 Dok | Melakukan penyetoran pajak-pajak |
| | | Terlaksananya pembayaran atas tagihan/kwitansi | 4 Jumlah Bukti pembayaran atas tagihan/kwitansi | 1 Dok | Membuat Bukti pembayaran atas tagihan/kwitansi |
| | | Tersedianya register penutupan kas | 5 Jumlah Dokumen Register Penutupan Kas | 1 Kegiatan | Membuat Dokumen Register Penutupan Kas |
| | | Tersedianya laporan/surat pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) | 6 Jumlah Berkas laporan/surat pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) | 12 Berkas | Membuat Berkas laporan/surat pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) |
| | | Terlaksananya Pemeriksaan Kas setiap bulannya | 7 Jumlah Berkas Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya. | 12 Berkas | Membuat Berkas Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya. |

KASUBBAG. TATA USAHA

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si.
NIP. 19760225 200904 1 001

BENDAHARA PENGELUARAN

RAHMADANIS, S.E.
NIP. 19810317 200604 2 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMA AKURNIAWAN
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.SI
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
Penata TK.I
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA


RISMA AKURNIAWAN
Pengatur
NIP. 19901014 201503 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Melakukan Pemberian Dukungan Administrasi Ketatausahaan, kerumahtangaan, Kepegawaian, arsip dan dokumentasi. | Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN |
| 2. | | Membuat dan Menyiapkan absen harian dan Rekap bulanan PNS dan TKS |
| 3. | | Menerima dan menyetik permohonan cuti PNS |
| 4. | | Menyetik Surat Keluar |
| 5. | | Membantu menyiapkan surat perjanjian TKPK |

KASUBBAG TATA USAHA



WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.SI
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA,



RISMA AKURNIAWAN
NIP. 19901014201503 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZKIA AYUTRI MANUHUTU, S.E.

Jabatan : PENATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si.

Jabatan : KASUBBAG. TATA USAHA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si
NIP. 19760225 200904 1 001

PIHAK PERTAMA,

REZKIA AYUTRI MANUHUTU, S.E.
NIP. 19911126 201902 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD Perubahan 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Terlaksanannya penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan | 1 laporan |
| 2 | Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah | 2 laporan |
| 3 | Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | 4 laporan |
| 4 | Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah | 2 laporan |
| 5 | Tersusunnya dokumen pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | 3 dokumen |
| 6 | Tersusunnya dokumen penilaian mandiri reformasi birokrasi perangkat daerah | 3 dokumen |

KASUBBAG. TATA USAHA



WAN SYAPARUDDIN, S.T, M.Si.
NIP. 19760225 200904 1 001

PELAKSANA



REZKIA AYUTRI MANUHUTU, S.E.
NIP. 19911126 201902 2 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afdal Syamsir, S.T, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Satrio Wibowo, A.P, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

Satrio Wibowo, A.P, M.Si

PIHAK PERTAMA

Afdal Syamsir, S.T, M.T

**RENCANA AKSI
TAHUN 2024
ESSELON III
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| NO | SARAN STRATEGIS | INDIKATOR SARAN | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 | TARGET PELAKSANAAN | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | PAGU | KEURATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | PAGU | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|---|--------|-------------|--|---|---|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 1 | MISI 1: MENGEMBANGKAN PERSEKONOMAN KOTA YANG BERDAYA SAHIB DAN BERTUMBUH PADA PELAYANAN DAN INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan : Meningkatkan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan Uji Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran : tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Peserta Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan | % | 85 | - | 25% | 40% | 30% | PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Peserta Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan | 15% | 690.000,000 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Uji Kompetensi | Proses pelaksanaan pelatihan dan pelatihan interaktif bagi peserta kerja berdasarkan standar Kompetensi | Jumlah Peserta Kerja yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 100% | 190.000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Perencanaan dan Pemeliharaan Lembaga Pelatihan Kerja | Penyediaan Sumber Daya Manusia Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia LPKS | 100% | 47.512,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja | 100% | 66.375,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Lembaga Kerja Swasta | Pembinaan Lembaga Kerja Swasta | Peningkatan pemahaman tentang Regulasi LPKS | 100% | 81.358,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil | Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil | Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil | 100% | 39.687,900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Pemeliharaan Kompetensi | Pelatihan Uji Kompetensi | Pengadaan Peserta Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi | 900 Orang | 100.000,000 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | 474.702,900 |

Dumai, September 2024
Kabid. Pelatihan dan Produktivitas



APD/AE SYAMSIR, S.T., M.T
NIP. 19720228 200112 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ita Rosita, S.Ag, M.Si
Jabatan : Instruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Afdal Syamsir, S.T, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA

Ita Rosita, S.Ag, M.Si

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|---------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembelajaran serta pengembangan pelatihan | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran pelatihan atau pengukuran produktivitas individu | Dokumen | 4 |
| 2. | | Melakukan penyusunan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |
| 3. | | Melakukan penyusunan program peningkatan produktivitas bagi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat | Dokumen | 3 |
| 4. | | Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit Kompetensi (lesson plan) pada level teknisi | Dokumen | 3 |
| 5. | | Melaksanakan perbaikan peralatan pelatihan | Dokumen | 4 |
| 6. | | Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah | Dokumen | 4 |
| 7. | | Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah | Dokumen | 3 |
| 8. | | Mengembangkan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA



Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA



Ita Rosita, S.Ag, M.Si



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Weni Syamsul, S.T
Jabatan : Instruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Afdal Syamsir, S.T, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA

Weni Syamsul, S.T

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|---------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembelajaran serta pengembangan pelatihan | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran pelatihan atau pengukuran produktivitas individu | Dokumen | 4 |
| 2. | | Melakukan penyusunan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |
| 3. | | Melakukan penyusunan program peningkatan produktivitas bagi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat | Dokumen | 3 |
| 4. | | Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit Kompetensi (lesson plan) pada level teknisi | Dokumen | 3 |
| 5. | | Melaksanakan perbaikan peralatan pelatihan | Dokumen | 4 |
| 6. | | Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah | Dokumen | 4 |
| 7. | | Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah | Dokumen | 3 |
| 8. | | Mengembangkan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA



Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA



Weni Syamsul, S.T



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evie Roza Fitriah, S.E
Jabatan : Instruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Afdal Syamsir, S.T, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA

Evie Roza Fitriah, S.E

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|---------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembelajaran serta pengembangan pelatihan | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran pelatihan atau pengukuran produktivitas individu | Dokumen | 4 |
| 2. | | Melakukan penyusunan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |
| 3. | | Melakukan penyusunan program peningkatan produktivitas bagi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat | Dokumen | 3 |
| 4. | | Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit Kompetensi (lesson plan) pada level teknisi | Dokumen | 3 |
| 5. | | Melaksanakan perbaikan peralatan pelatihan | Dokumen | 4 |
| 6. | | Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah | Dokumen | 4 |
| 7. | | Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah | Dokumen | 3 |
| 8. | | Mengembangkan program pelatihan pada level operator | Dokumen | 2 |

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA



Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA



Evie Roza Fitriah, S.E



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Purnomo, S.E
Jabatan : Analis Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Afdal Syamsir, S.T, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

Afdal Syamsir, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA

Agus Purnomo, S.E

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|--------------------|----------------|
| | | | | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkan kualitas daya saing pencari kerja lokal serta meningkatkan minat para pencari kerja dalam industry dan berwirausaha | 1.1 Penyiapan data dan bahan proses pemagangan dan produktivitas tenaga kerja 2.1 Memfasilitasi antara peserta pemagangan dan perusahaan tempat magang | Dokumen Dokumen | 6 6 |
| 2. | Mendalami pengetahuan, keterampilan dan keahlian dibidang kewirausahaan | Penyiapan bahan informasi pemagangan dan pendataan peserta magang berdasarkan wilayah kecamatan | Dokumen | 6 |
| 3. | Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan | Penyiapan data dan bahan dalam rangka penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan | Dokumen | 1 |
| 4. | Melakukan verifikasi usulan pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang di verifikasi | Dokumen | 1 |
| 5. | Mengadakan pelatihan kepada pencari kerja sesuai standar kompetensi | Mengadakan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi | Dokumen | 30 |
| 6. | Melakukan sertifikasi kepada para pencari kerja | Mengadakan pelatihan sertifikasi bagi pencari kerja | Dokumen | 16 |
| 7. | Melakukan pendataan mengenai kebutuhan pelatihan tenaga kerja | Melakukan pendataan mengenai kebutuhan pelatihan tenaga kerja | Dokumen | 1 |
| 8. | Melakukan pendataan kepada tenaga kerja yang sudah mempunyai sertifikasi | Tersedianya data peserta pelatihan yang sudah tersertifikasi | Dokumen | 1 |

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA



AFDAL SYAMSIR, S.T, M.T

PIHAK PERTAMA



AGUS FURNOMO, S.E

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRY MARTIN, SE, M.Si

Jabatan : Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

Dumai, September 2024

Pihak Pertama,


ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBDP 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|---|-----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan Pasar kerja | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 20 orang | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Rp 80.000.000 |
| 2 | | jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub) | 200 orang | Pengelolaan informasi pasar kerja | Rp 50.000.000 |
| 3 | | jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi | 15 prang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 4 | | jumlah PMI purna yang diberdayakan | 20 orang | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 5 | | jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online | 2 dokumen | Pengelolaan informasi pasar kerja | Rp 50.000.000 |
| 6 | | jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 7 | | jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 580.000.005 |

KEPALA



SATRIO WIBOWO, A.P., M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRAWATI, S.Sos
Jabatan : FUNSIONAL PENGANTAR KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDRY MARTIN, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 30 September 2024

Pihak Kedua

ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

Pihak Pertama

IRAWATI, S.Sos
NIP. 19711007 199403 2 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBDP 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------|--|--|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan Pasar kerja | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 20 orang | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Rp 80.000.000 |
| 6 | | jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| 7 | | jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | 50 orang | Pelayanan antar kerja di Daerah kabuten/Kota | Rp 100.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | Rp 280.000.005 |

KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 197905182008011012

JF. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

IRAWATI, S.Sos
NIP. 197110071994032003

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL, S.I.P
Jabatan : ANALIS BAHAN PENEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDRY MARTIN, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua

ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

Pihak Pertama

ISMAIL, S.I.P
NIP. 19761206 200604 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi | 4 Berkas |
| 2 | menyiapkan bahan pelayanan administrasi kartu pencari kerja | 4 Berkas |
| 3 | pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon pekerja migran indonesia (PMI) ke luar negeri. | 6 Berkas |
| 4 | mengelola data perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi | 5 Berkas |

KEPALA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KARJA DAN TRANSMIGRASI



ANDRY MARTIN, SE, M.Si
NIP. 19790518 200801 1 012

PELAKSANA,
ANALIS PENEMPATAN KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



ISMAIL, S.I.P
NIP. 19761206 200604 1 010

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AFRINAIDI, S.Sos
Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD-P 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online | 15 Perusahaan | PENGESEHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 75.000.000 |
| 2 | | Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 5 Perusahaan | | 54.593.400 |
| 3 | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | | 241.100.000 |
| 4 | | Jumlah Perselisihan yang dicegah | 15 Perkara | PENCEGAHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | 75.000.000 |
| 5 | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 40 Perkara | | 75.000.000 |
| 6 | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 46.268.300 |
| 7 | | Jumlah LKS Tripartit yang dibina | 1 Lembaga | | 75.000.000 |
| 8 | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 50 orang | | 2.265.025.400 |
| Jumlah Anggaran | | | | | 2.906.987.100 |

KEPALA,



SATRIO WIBOWO, A.P., M.Si
NIP. 19770524 199602 1 002

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DAHLAN SYAFTERA, S.Sos
Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Jabatan : JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFRINAIDI, S.Sos
Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

DAHLAN SYAFTERA, S.Sos
NIP. 19720527 200003 1 004

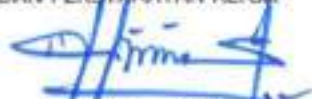
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD-P 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------------------|---|---|---------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online | 15 Perusahaan | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 75.000.000 |
| | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 5 Perusahaan | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama | 54.593.400 |
| | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 50 orang | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 2.265.025.400 |
| | | Jumlah Perselisihan yang dicegah | 15 Perkara | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
| | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 40 Perkara | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | 2.544.618.800 |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA


AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL


DAHLAN SYAFTERA, S.Sos
NIP. 19750418 200904 1 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BOBSIDES,ST

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Jabatan : JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

BOBSIDES, ST
NIP. 19720527 200003 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD-P. 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja | Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 46,268,300 |
| | | Jumlah LKS Tripartit yang dibina | 1 Lembaga | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota | 75,000,000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | 121,268,300 |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



BOBSIDES, ST
NIP. 19720527 200003 1 004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MULYANI, S.H

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Jabatan : JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

MULYANI, S.H
NIP. 19840101 201001 2 042

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
: APBD-P 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------------------|---|--|------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Jumlah Perselisihan yang dicegah | 15 Perkara | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
| | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 40 Perkara | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
| Jumlah Anggaran | | | | | 150.000.000 |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

JF. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



MULYANI, S.H
NIP. 19840101 201001 2 042

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JUMIANTI, A.Md

Jabatan : Pengelola Data

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

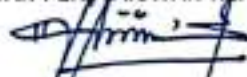
ADE JUMIANTI, A.Md
NIP. 19780418 201001 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBDP 2024

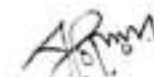
| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | (disesuaikan dengan pekerjaan) |
| 1 | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online | 6 Surat |
| 2 | Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 2 Surat |
| 3 | Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Surat |
| 4 | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3 Surat |
| 5 | Terlaksananya administrasi syarat kerja terhadap surat balasan dan penomoran registrasi dari permohonan pengesahan pencatatan PKWT, PKWTT, KHL dan lainnya antara pekerja dan perusahaan | 60 Surat |
| 6 | Tersedianya data pekerja/rekapan data pencatatan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan | 60 Surat |
| 7 | Tersedianya administrasi persuratan persyaratan kerja pelaporan perjanjian pekerjaan alih daya | 60 Surat |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200712 1 003

PELAKSANA,



ADE JUMIANTI, A.Md
NIP. 19780418 201001 2 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIKHI PERMATA PUTRA, SKM
Jabatan : ANALIS BAHAN PERSYARATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AFRINAIDI, S.Sos
Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

RIKHI PERMATA PUTRA, SKM
NIP. 19860522 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | (disesuaikan dengan pekerjaan) |
| 1 | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online | 6 Surat |
| 2 | Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 2 Surat |
| 3 | Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Surat |
| 4 | Tertelaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3 Surat |
| 5 | Tertelaksananya administrasi syarat kerja terhadap surat balasan dan penomoran registrasi dan permohonan pengesahan pencatatan PKWT, PKWTT, KHL dan lainnya antara pekerja dan perusahaan | 55 Surat |
| 6 | Tersedianya data pekerja/rekapan data pencatatan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan | 55 Surat |
| 7 | Tersedianya administrasi persuratan persyaratan kerja pelaporan perjanjian pekerjaan alih daya | 55 Surat |
| 8 | Tersedianya administrasi persuratan persyaratan kerja Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | 6 Surat |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA

N. HAIDE, S.Sos
NIP. 19790102 200112 1 003

ANALIS BAHAN PERSYARATAN KERJA,

RIKHI BERMATA PUTRA, SKM
NIP. 19860522 201001 1 008

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KATHERINA SIAHAAN,SE
Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFRINAIDI, S.Sos

Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

KATHERINA SIAHAAN, SE
NIP. 19870920 200904 2001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS TENAGA KERJAKOTA DUMAI
: APBD 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tersedianya Pengesahaan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh | 15 Surat |
| 2 | Terlaksananya Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh | 10 Kegiatan |
| 3 | Tersedianya Pencatatan LKS Bipartit | 15 Surat |
| 4 | Terlaksananya Pembinaan LKS Bpartit | 10 Kegiatan |
| 5 | Tersedianya bahan rapat Dewan Pengupahan | 1 Dokumen |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PELAKSANA,



KATHERINA SIAHAAN, SE
NIP. 19870920 200904 2 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GURNIAWAN
Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFRINAIDI, S.Sos
Jabatan : KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 30 September 2024

Pihak Kedua,

AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

Pihak Pertama,

GURNIAWAN
NIP. 19890429 201503 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : APBD-P 2024

| NO | SASARAN | TARGET |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tersedianya surat panggilan klarifikasi/mediasi | 24 Surat |
| 2 | Tersedianya surat Risalah, Perjanjian Bersama maupun anjuran | 25 Surat |
| 3 | Terlaksananya dokumentasi saat sidang klarifikasi/mediasi | 48 foto |
| 4 | Terlaksananya distribusi surat panggilan Klarifikasi/Mediasi kepada para pihak | 24 lembar pengantar |
| 5 | Tersedianya bahan rapat Dewan Pengupahan | 1 dokumen |
| 6 | Tersedianya Surat Edaran Upah Minimum Kota Dumai Tahun 2025 | 1 dokumen |
| 7 | Tersedianya Rekapitan Kasus Perselisihan hubungan industrial perbulan dan pertahun | 1 dokumen |

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PERSYARATAN KERJA



AFRINAIDI, S.Sos
NIP. 19780102 200112 1 003

PELAKSANA,



GURNIAWAN
NIP. 19890429 201503 1 004

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
 Tahun Anggaran : 2024

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Formulasi Perhitungan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan | $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yg Dilatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100 \%$ | 10 | 4,59% | 10 |
| 2 | | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yg Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100 \%$ | 10 | 20,26% | 10 |
| 3 | Terciptanya situasi kerja yang kondusif | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Kasus yg diselesaikan dg PB}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100 \%$ | 20 | 40,62% | 20 |

Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp 9.584.669.104
 Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp 8.310.193.973
 Persentase Capaian Tahun 2024 : 86,7%



Dumai, Januari 2024
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KOTA DUMAI

SATRIO WIBOWO, A.P. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770524 199602 1 002

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

| NO | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian Kinerja (Rp) | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|----|---------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.672.979.104 | 5.093.361.855 | 89,78% | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.553.000 | 12.277.000 | 52,12% | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 16.349.100 | 5.109.100,00 | 31,25% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.203.900 | 7.167.900,00 | 99,50% | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.605.099.608 | 3.469.834.082 | 96,25% | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.596.116.000 | 3.460.907.474,00 | 96,24% | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.983.608 | 8.926.608,00 | 99,37% | | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 36.000.000 | - | 0,00% | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 36.000.000 | - | 0,00% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 292.610.056 | 158.476.689 | 54,16% | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.975.000 | 12.529.700,00 | 78,43% | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70.005.752 | 49.092.970,00 | 70,13% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 29.377.000 | 25.233.500,00 | 85,90% | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7.576.400 | 3.029.067,00 | 39,98% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.050.000 | 1.851.000,00 | 36,65% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 164.625.904 | 66.740.452,00 | 40,54% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 489.544.796 | 432.829.000 | 88,41% | | |
| | | | Pengadaan Mebel | 66.057.200 | 29.390.000,00 | 44,49% | Kegiatan belanja tidak dilakukan dikarenakan adanya penundaan bayar | Pengembalian dana |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 423.487.596 | 403.439.000,00 | 95,27% | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 855.824.544 | 761.775.075 | 89,01% | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00% | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 141.769.704 | 131.201.435,00 | 92,55% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 709.054.840 | 625.573.640,00 | 88,23% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 370.347.100 | 258.170.009 | 69,71% | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 103.276.991 | 69.487.000,00 | 67,28% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 86.023.009 | 86.023.009,00 | 100,00% | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.200.000 | 24.970.000,00 | 63,70% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 141.847.100 | 77.690.000,00 | 54,77% | Tunda bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 80.000.000 | 40.071.272 | 50,09% | | |
| | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 80.000.000 | 40.071.272 | 50,09% | | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 80.000.000 | 40.071.272,00 | 50,09% | | |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 474.702.900 | 316.766.850 | 66,73% | | |
| | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 200.000.000 | 196.635.000 | | | |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 100.000.000 | 96.685.000,00 | 96,69% | | |
| | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 99.950.000,00 | 99,95% | | |
| | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 81.358.000 | 8.450.000 | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 81.358.000 | 8.450.000,00 | 10,39% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | 67.312.000 | 42.770.500 | | | |
| | | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 67.312.000 | 42.770.500,00 | 63,54% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | 59.657.900 | 27.440.000 | | | |
| | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan K | 59.657.900 | 27.440.000,00 | 46,00% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 66.375.000 | 41.471.350 | | | |
| | | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 66.375.000 | 41.471.350,00 | 62,48% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 450.000.000 | 157.081.280 | 34,91% | | |
| | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000 | 104.572.280 | 41,83% | | |
| | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 100.000.000 | 19.612.280,00 | 19,61% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 50.000.000 | - | 0,00% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Perluasan Kesempatan Kerja | 100.000.000 | 84.960.000,00 | 84,96% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 100.000.000 | 52.509.000 | | | |
| | | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 50.000.000 | 34.900.000,00 | 69,80% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 50.000.000 | 17.609.000,00 | 35,22% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | - | 0,00% | | |
| | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 100.000.000 | - | 0,00% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.906.987.100 | 2.702.912.716 | 92,98% | | |
| | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 370.693.400 | 305.332.795 | 82,37% | | |
| | | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagiPerusahaan | 75.000.000 | 68.970.345,00 | 91,96% | | |
| | | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagiPerusahaan | 54.593.400 | 48.962.450,00 | 89,69% | | |
| | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 241.100.000 | 187.400.000,00 | 77,73% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |
| | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 2.536.293.700 | 2.397.579.921 | 94,53% | | |
| | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) | 75.000.000 | 47.661.101,00 | 63,55% | | |
| | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak | 75.000.000 | 56.465.520,00 | 75,29% | | |
| | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat | 46.268.300 | 38.074.600,00 | 82,29% | | |
| | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 | 4.515.000,00 | 6,02% | | |
| | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 2.265.025.400 | 2.250.863.700,00 | 99,37% | Tunda Bayar | Melakukan refocusing anggaran TA 2025 |